

"ANALISIS RESISTENSI  
PEDAGANG KAKI LIMA  
TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA  
GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS  
PADA PASAR BERINGIN KOTA  
GUNUNGSITOLI)"

*by Tafonao Nofita*

---

**Submission date:** 21-Dec-2023 09:30PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2263920582

**File name:** 210778.docx (114.3K)

**Word count:** 13008

**Character count:** 84867

**ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA**  
**TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**(STUDI KASUS PADA PASAR BERINGIN KOTA GUNUNGSITOLI)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**NOFITA TAFONAO**  
NIM. 2319368

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NIAS**



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS  
UNIVERSITAS NIAS  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI S-I MANAJEMEN**

Alamat : Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Homepage: <https://fe.unias.ac.id> email: [fe@unias.ac.id](mailto:fe@unias.ac.id)

---

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**1** Skripsi dengan judul Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli { Studi Kasus Pada Pasar Beringin Kota Gunungsitoli} Yang Di susun oleh Nofita Tafonao Nim 2319368 Program Studi Manajemen, telah dikoreksi dan di revisi oleh Pembimbing sehingga dapat dilanjutkan untuk sidang ujian skripsi.

Gunungsitoli, November 2023

Dosen Pembimbing

**FATOLOSA HULU S.E.,M.M**

## **KATA PENGANTAR**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi Penelitian ini dengan baik. Sikripsi penelitian ini disusun atas kerja sama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si selaku Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria Magdalena Bate'e, SE., MM. selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
3. Bapak Yupiter Mendrofa, SE., MM selaku Plt. Ketua Program Studi Manajemen Universitas Nias.
4. Bapak Fatolosa Hulu S.E., M.M Sebagai Dosen pembimbing yang telah bersedia Memberikan membimbing, arahan, dan motivasi kepada peneliti dalam proses penyelesaian sikripsi ini.
5. Bapak Karya Septianus Batee, SSTP, MAP Pembina Pengembangan Daerah Kota Gunungsitoli yang memberikan waktu dan pikiran untuk meneliti di Pasar Beringin
6. Bapak .....selaku Dosen penelaah yang memberikan ide dan pikiran untuk membantu penyusunan sikripsi peneliti ini.
7. Seluruh Dosen dan staf pegawai yang telah memberikan informasi dalam penyusunan sikripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada keluarga penulis yang mendukung, selalu memberikan semangat dalam pembuatan sikripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada teman – teman semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun Sikripsi ini .

Peneliti menyadari adanya keterbatasan didalam penyusunan Sikripsi penelitian ini. Besar harapan peneliti akan dan kritik yang bersifat membangun.

Gunungsitoli, November 2023

Peneliti,

NOFITA TAFONAO

NIM 2319368

<b>COVER</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Peneliti .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Teori .....	7
2.3 Pengertian Resistensi .....	7
2.4 Jenis – Jenis Resisten .....	8
2.5 Tujuan Resistensi .....	9
2.5 Indikator Resistensi .....	10
2.6 Faktor – Faktor Resistensi .....	13
2.7 pengertian Pedagang kaki lima .....	13
2.7.1 Jenis Pedagang Kaki Lima .....	14
2.7.2 Kebijakan .....	16
2.8 Penelitian Terdahulu .....	17
2.8 Kerangka Berpikir .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Pendekatan Jenis penelitian .....	18
3.2 Lokasi Dan jadwal Penelitian .....	11
3.3 Informan Penelitian .....	19
3.2 Variabel Penelitian .....	20
3.1.2 Sumber data .....	20
3.4. Instrumen Penelitian .....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Teknik Analisis Data .....	23

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Analisis Temuan Penelitian .....	24
4.1.1 Profit Singkat .....	28
4.1.2 Kebijakan Perda PKL .....	28
4.1.3 Jumlah Pedagang Kaki Lima .....	31
4.1.4 Resistensi Pedagang Kaki Lima .....	32
4.1.5 Faktor Penyebab Penolakan .....	32
4.1.6 Bentuk – Bentuk Restensi .....	32
4.1.7 Menolak Relokasi .....	34
4.1.8 Tetap Berjualan Di Trotoar .....	34
4.2 Kebijakan Perda PKL .....	34
4.2.1 Hasil Wawancara .....	38
4.2.2 Hasil Analisis Data .....	51
4.2.3 Pembahasan .....	62
4.5.3 Mengatasi Resistensi PKL Terhadap Kebijakan Pemerinath .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	68
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan Migrasi keperkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga kerja.

Peluang kerja yang diharapkan di kota semakin sepi, selain itu perusahaan – perusahaan baik disektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak lagi bertahan. Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper -emper yang sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kehadiran Pedagang Kaki Lima dianggap bertentangan dengan semangat Kota yang menghendaki adanya menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar dan sebagian badan jalan, yang menempati lokasi usah, seenaknya membuang sampah sembrangan tempat. Perilaku ini dimata pemerintah sangat mengganggu keberhasilan dan keteraturan kota Gunungsitoli.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima tersebut tentunya akan membuat fasilitas tersebut umum yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat Pemerintah Kota akan mengeluarkan Kebijakan relokasi yang ditetapkan memiliki tujuan agar fasilitas umum daerah serta penjualan yang ada diwilayah tersebut lebih tertata dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat.



Trotoar – trotoar kota telah ditetapkan kebijakan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk berjualan oleh PKL. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota yaitu mulai dengan penertiban melakukan penertiban PKL Sehingga pasar. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, ketetraman serta kebersihan alun – alun kota sehingga pedagang digunakan fasilitas umum kota sebagai tempat berjualan, kecuali dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh pemerintah kota gunungsitoli.

Kebijakan pemerintah kota adalah Institusi /penaatan Kewewengan mengatur, menata, pembina PKL Trotoar - trotoar berdasarkan Kebijakan ini seringkali ditunjukan untuk mencapai keseimbangan antara mendukung keberlangsungan usaha PKL dan menjaga ketertiban dan keamanan kota. Resistensi pedagang kaki lima kota sangat beragam. Resistensi yang dilakukan diantaranya seperti tetap berdagang di pasar trotoar hingga melakukan kegaduhan di pasar yang bermunculan terhadap kebijakan pemerintah kota PKL disekitar trotoar bahwa kebijakan pemerintah kota yang dibuat oleh pemerintah kota Menurut Pedagang kaki Lima sangat merugikan pedagang. Sehingga banyak aksi – aksi protes yang bermunculan terhadap kebijakan pemerintah kota yang telah dibuat pedagang kaki Lima kota juga membentuk paguyuban untuk menentang Kebijakan Pemerintah paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi pedagang.

Menurut (mentari dkk, 2018:328-337). Maraknya PKL disuatu wilayah juga disebabkan sulitnya lapangan pekerjaan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi atau jasa yang tidak berizin dan tidak menetap atau berpindah.

Kebijakan pemerintah Kota Tindakan informal sudah ditetapkan telah dilaksanakan sampai saat ini, namun, Regulasi dan Perizinan Penerbitan dalam implementasi kebijakan pasar munculnya persepsi negatif bagi para pedagang kaki lima di trotoar pasar dan juga resistensi di wilayah tersebut.

Kebijakan menurut Hasibuan (2019:1) adalah proses yang dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan atau alat dapat mencapai tujuan yang telah di tentukan. Sedangkan menurut B.R S parker dalam Mufidah (2020 :159 - 166) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.

Lumbantoran dkk (2021: 914-923) menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaaitu karena adanya perbedaan persepsi atau pemikiran antara indiviu dan menyebabkan terjadinya upaya penolakan didalam suatu organisasi.

Masih ada Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pasar yang tidak di Izinkan oleh Pemerintah Kota atau tentang larangan- larangan yang berjualan di area depan pasar. Setelah melakukan observasi terdapat pedagang yang masih berjualan tidak pada tempatnya.

tabel 1

#### Jenis –jenis Usaha Pedagang Kaki Lima

No	Pedagang	Lokasi
1	Sayur	Di depan pasar
2	Cabe / Bawang	Di depan pasar
3	Buah – Buahhan	Di depan pasar
4	Tahu, Tempe dan Tauge	Di depan pasar
5	Ikan	Dibelakang pasar
6	Martabat Telur	Di depan pasar
7	Ubi	Di depan pasar

<sup>1</sup> Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku Sektor Informal untuk kembali menggelar denganya. Setiap kali ada razia, begitu petugas pergi, maka pedagang kaki lima datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sediakala. Begitulah kegigihan pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharia hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pedagang kaki lima yang bermunculan di kota – kota, salah satunya di kota gunugsitoli.

“Permasalahan PKL di pasar sebenarnya Pedagang Kaki Lima berkeinginan melakukan penjualan di atas trotoar. Terkait hal itu pemerintah Kota telah merelokasikan Tempat penjualan pedagang kedalam kios Pasar Beringin, tetapi hasil kebijakan Pemerintah Kota terkait relokasi tidak merasa puas, tidak setuju dan tidak adil bagi Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima menganggap Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Kota Merugikan Usaha dan Mata Pencaharian Mereka.

Berdasarkan Kebijakan Formal Relokasi pedagang Kota Sebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar ada beberapa kebijakan Formal Terkait relokasi pedagang di Pasar yaitu Penetapan Lokasi Baru, Perizinan dan Izin Usaha, Bantuan Relokasi, Sosialisasi dan Konsultasi, Fasilitas dan Infrastruktur, Keamanan dan Ketertiban, Pemantauan dan Evaluasi. Kebijakan formal relokasi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan holistik untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan ini harus mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat, serta mengakui dan mengelola dampak negatif yang mungkin timbul selama dan setelah proses Relokasi. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Pedagang Kaki Lima liar karena mereka menempati Daerah larangan . penertiban yang dilakukan oleh kebijakan Pemerintah seringkali menimbulkan Resistensi atau Perlawanan Pedagang Kaki Lima.

Demikian pula Pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli dalam menjalankan kegiatannya menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang diharapkan. Dampak berbagai masalah kota Gunungsitoli Pasar Beringin Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli dengan judul **ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Spradley (dalam Sugiyono, 2016) mengemukakan pengertian fokus penelitian bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa

domain yang terkait dari situasi sosial dan menetapkan fokus penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan iforman. Fungsi dari fokus penelitian adalah untuk membatasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya fokus penelitian, maka peneliti tidak akan kebingungan akan banyaknya data yang didapatkan.

Berdasarkan Uraian diatas maka fokus dalam penelitian ini adalah Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Apa Faktor penyebab pedagang kaki lima menolak kebijakan Pemerintah?
2. Bagaimana bentuk- bentuk penolakan Pedagang kaki lima di pasar Beringin terhadap kebijakan pemerintah kota gungsitoli?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di pasar beringin
2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk Penolakan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Terhadap kebijakan Pemerintah

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni :

1. Bagi Univesrsitas Nias:

Bagi dunia akademisi, sikripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu analisis Resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

Bagi Instan/Pemerintah:

Melalui hasil penelitian ini secara praktis dan dapat dijadikan pedoman bagi instansi tentang analisi resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintak Kota Gunungsitoli

- a. Bagi Akademik :

Bagi dunia akademisi, skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan

pemerintah.

b. Bagi Instansi/Pemerintahan :

Melalui hasil penelitian ini secara praktis dan dapat dijadikan pedoman bagi Instansi tentang Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

c. Bagi peneliti :

Dapat meningkatkan pengetahuan peneliti khususnya Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

#### 2.1.1 Resistensi

Resistensi Dalam ( <sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 :645) Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan juga tindakan pengamanan untuk *survie*, meskipun seringkali resistensi juga menghambat kemajuan budaya manusia. Resistensi tidak selalu terlihat, karena Bentuk dari resistensi itu sendiri berbeda – beda. Ada hanya untuk sekedar tidak ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan tersebut atau berusaha menjauhinya.

Menurut Dwi Septiana ( 2011 : 75). Resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku bersifat eksploitatif dan tidak adil.

<sup>3</sup> Menurut Matsumoto dalam Handoyo (2012:139) menyatakan bahwa “resistensi adalah suatu proses menentang, melawan, atau bertahan dari sesuatu atau orang lain”.

Resistensi pedagang kaki lima kemudian bukan di temukan <sup>1</sup> dalam individu, tetapi dalam persepsi dibangun oleh individu. Partisipan yang mempunyai perbedaan persepsi yang dibangun akan mempunyai anggapan yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan dunianya. Persepsi yang ada di masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam pikiran manusia yang berisi ide dan gagasan dan memiliki batas – batas norma serta nilai – nilai tatanan dalam masyarakat itu sendiri. Hasilnya mereka menempuh tindakan yang berbeda dan menunjukan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung pada lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup.

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahawa resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah

membantu memahami sifat resistensi dan menggambarkan bahwa resistensi dapat menjadi reaksi yang wajar dari individu atau kelompok ketika mereka merasa terancam oleh perubahan atau kebijakan yang diberlakukan. Penting untuk diingat bahwa tingkat dan bentuk resistensi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik dari perubahan atau ancaman yang dihadapi.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Resistensi**

Resistensi Pasif menurut (Hando yono ,2012) menyatakan bahwa Jenis resistensi ini ditandai dengan perilaku Pedagang kaki lima yang menolak kebijakan Pemerintah atau mempertahankan status quo tanpa menunjukkan perlawanan secara terbuka. Hal ini mungkin terlihat dalam ketidak aktifan, ketidak pedulian, atau penolakan diam terhadap Kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa resistensi ini mencirikan pedagang kaki lima yang tidak secara terbuka menentang atau melawan kebijak pemerintah, tetapi mereka menunjukkan penolakan atau ketidak setujuan secara tidak langsung melalui perilaku seperti: ketidak suka terhadap kebijakan: menyatakan bahwa ketidak sukaan terhadap perubahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Manusia cenderung memiliki zona nyaman, dan ketika ada kebijakan pemerintah yang merubah kondisi atau rutinitas yang biasa, beberapa individu atau kelompok mungkin merasa tidak nyaman atau khawatir dengan kebjakan tersebut.

kejutan dan ketakutan yang tidak di ketahui : Ketidak pastian atas perubahan atau akibat dari kebijakan yang tidak diketahui dapat menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang dapat memicu resistensi. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa hasil perubahan tidak dapat diprediksi atau tidak diketahui sepenuhnya, mereka mungkin lebih cenderung menolak kebijakan tersebut. muncul tidak rasa percaya: individu atau masyarakat merasa bahwa tujuan atau alasan di balik kebijakan tidak transparan atau tidak dapat dipercaya, maka rasa tidak percaya ini dapat menjadi pemicu resistensi. Kepercayaan adalah elemen penting dalam membangun dukungan terhadap perubahan. rasa takut akan kegagalan : Rasa takut akan kegagalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi resistensi. Jika pedagang merasa bahwa kebijakan berpotensi menyebabkan kegagalan atau kerugian bagi mereka, mereka mungkin enggan atau menentang perubahan tersebut. merasa tidak

nyaman tidak mendapat kepastian: Ketidak pastian dan ketidak jelasan seputar perubahan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi pemerintah atau masyarakat. Kekhawatiran akan hilangnya kepastian atau stabilitas dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

### **2.1.3 Tujuan Resistensi Pedagang Kaki Lima**

Menurut Dewi Septiana , (2011:9) bahwa tujuan resistensi pedagang kaki lima ada beberapa yaitu: Melindungi mata pencaharian dan eksistensi usaha: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk melindungi mata pencaharian mereka dan eksistensi usaha mereka dari perubahan atau kebijakan yang dapat mengancam usaha mereka.

Mempertahankan hak-hak dan kebebasan berusaha: Pedagang kaki lima mungkin melakukan Resistensi untuk mempertahankan hak-hak dan kebebasan berusaha mereka yang dianggap terancam oleh kebijakan atau peraturan baru.

Menentang ketidakadilan dan diskriminasi: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau diskriminatif terhadap sektor informal.

Menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk mendapatkan keterlibatan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada usaha mereka. Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk memperjuangkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam ekonomi dan perlindungan hukum yang memadai.

### **2.2.4 Indikator Resistensi Pedagang Kaki Lima**

1. Menurut (Ford & Ford, 2009: 26009) Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Tindakan formal pemerintah memiliki dampak signifikan pada masyarakat, oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk memecahkan masalah dan mencerminkan kebutuhan



nyata masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, pengambilan keputusan dapat menjadi lebih holistik dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Menurut (Oreg, Vakola, dan Armenakis, 2011 : 69) penolakan terhadap kebijakan pemerintah : Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap atau tindakan dari pedagang kaki lima dalam menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan dan tidak adil bagi kepentingan mereka.

Ketika pedagang Kaki Lima merasa bahwa kebijakan Pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka, atau bahkan berdampak negatif pada usaha dan pendapatan mereka, maka mereka cenderung menolak dan membantah kebijakan tersebut. Menyoroti pentingnya pandangan dan persepsi pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari kelompok pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau adil bagi mereka. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kaki Lima dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Pengakuan dan pengertian terhadap pandangan dan keluhan mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak yang terdampak. menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan kelompok pedagang kaki lima dapat membuka peluang untuk mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih adil. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pedagang kaki lima, akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Persepsi adil atau tidaknya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan, perlakuan yang adil dari pemerintah, dan dampak kebijakan tersebut pada kondisi kehidupan pedagang kaki lima.

Menurut Dawson, P. (2003) menyatakan bahwa indikator resistensi adalahh “Perlawanan Terbuka atau Kritik Terhadap Perubahan: Individu atau kelompok yang secara terbuka menyatakan ketidak setujuan atau kritik terhadap perubahan, baik melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung” artinya Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan adalah ketika individu atau kelompok dengan jelas menyatakan ketidak setujuan atau memberikan kritik terhadap perubahan yang sedang berlangsung dalam organisasi. Hal ini dapat terjadi melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung antara mereka dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menekankan pentingnya memahami persepsi dan pandangan pedagang kaki lima tentang Kebijakan Pemerintah. Penolakan terhadap Kebijakan dapat menjadi isyarat penting bagi Pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi dari kelompok usaha tersebut. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan konsekuensi dari tindakan formal yang diambil dalam merumuskan Kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

#### **2.2.5 Faktor – Faktor Resistensi Pedagang Kaki Lima**

Menurut para ahli Cynthia S. Arbaugh dan Gary W. Selnow (2005)ada beberapa faktor – faktor Resistensi pedagang kaki lima yitu:

1. Peraturan dan Hukum: Regulasi yang ketat atau peraturan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini terutama berlaku jika ada larangan atau batasan pada lokasi penjualan atau kegiatan mereka.
2. Penegakan Hukum: Jika penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berlebihan atau sewenang-wenang, hal ini bisa menjadi faktor resistensi karena dapat menyulitkan mereka untuk beroperasi dan mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka.
3. Persaingan dan Urbanisasi: Perkembangan kota dan persaingan bisnis dapat menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi, mempengaruhi pendapatan, dan memperumit akses ke lokasi penjualan yang menguntungkan.
4. Akses ke Sumber Daya: Keterbatasan akses ke modal, bahan baku, atau infrastruktur yang diperlukan untuk usaha pedagang kaki lima dapat

menyulitkan mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka.

5. Stigma Sosial: Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan negatif terhadap pedagang kaki lima, yang dapat menyebabkan stigma sosial dan mengurangi dukungan dari masyarakat atau pemerintah.
6. Ketidakpastian Ekonomi: Fluktuasi ekonomi atau krisis dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima.
7. Ketersediaan Ruang Publik: Masalah mengenai akses dan izin untuk menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan juga dapat menjadi faktor resistensi bagi pedagang kaki lima.
8. Teknologi dan Perubahan Perilaku Konsumen: Perubahan tren teknologi dan perilaku konsumen juga dapat berdampak pada cara pedagang kaki lima beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan.

Dalam menghadapi faktor-faktor resistensi ini, pedagang kaki lima harus mengembangkan strategi adaptasi dan inovasi untuk tetap bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah. Selain itu, upaya pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan usaha pedagang kaki lima.

### **2.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Menurut Nugroho (2003:59) pedagang kaklima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Menurut Damsar (2002:51) Pedagang kaki lima (Sektor informal adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagangan perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahannya menggunakan tempat – tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir- pinggir jalan umum, dan lain – lain sebagainya.

Menurut (Sinambela, 2008:14) Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor iformal. Pedagang kaki lima adalah orang - orang yang dengan modal yang relatif

sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang – barang (jasa – jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut pada tempat – tempat yang dianggap strategis dalam suaana lingkungan yang iformal

Pedagang kaki lima adalah sebagai yaitu orang – orang yang menawarkan barang – barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalur pejalan kaki di pinggir jalan ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima. Dari beberpa menurut para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa PKL adalah kelompok pedagang yang beroperasi di lingkungan informal dan sering menggunakan tempat-tempat fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Meskipun mereka bekerja dalam sektor informal dan menggunakan modal yang terbatas, PKL memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu dan memberikan kontribusi dalam sektor perdagangan di lingkungan perkotaan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh PKL serta memberikan dukungan dan regulasi yang tepat untuk memfasilitasi kelangsungan usaha mereka.

#### 2.3.4 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

(PKL) Selain itu Karafir (1997) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (1997) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu: Pedagang sayur, Pedagang cabe, Pedagang ikan, Pedagang Ubi.

larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, dijalan pinggir jalan umum, atau halte-halte dan tempat keramaian orang. Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para

pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gree dan Yeung (dalam Novita, 2014) di kota Gunungsitoli diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Menurut Novita (2014), adalah sebagai berikut :

1. Gerobak/kereta dorong Bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (static) atau semi permanen (semi static), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan rokok.
2. Warung semi permanen Terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (static) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
3. Kios Bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (static).
4. Jongko/meja Sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.
5. Gelaran/alas Pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static).

Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang - barang dan makanan. Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan perizinan.
2. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil
4. menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi
5. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat
6. Pedagang buah-buaha.
7. Pedagang Tahu, Tempe dan Tauge

### 2.3.5 Kebijakan

Kebijakan adalah Rangkaian konsep dan asas menjadi garis besar dan dasar rencana dipelaksana suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya.

Menurut Edi suharto (2005: 86), kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."

Menurut Weible dan Sabatier (2017: 4), kebijakan adalah "rangkaiian tindakan dan keputusan formal dan informal yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarahkan perilaku dan hasil kebijakan tertentu."

Menurut Dunn (2014: 21), kebijakan merupakan "suatu tindakan yang diambil atau dipilih oleh penguasa (atau oleh kelompok penguasa) dari suatu alternatif, yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu, berdasarkan atas suatu nilai atau keyakinan tertentu."

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau pernyataan formal dan informal yang diambil oleh pemerintah, kelompok, atau individu untuk mengarahkan perilaku dan mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu. Kebijakan bisa bersifat formal, seperti peraturan, undang-undang, atau keputusan pemerintah, maupun informal, seperti panduan, arahan, atau pernyataan dari kelompok atau individu.

### 3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini Menjadi salah satu referensi penulis selama penelitian, sehingga merugikan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam peneliti ini. Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan nama yang sama persis dengan penelitian penulis. Namun demikian, penulis mengutip beberapa judul penelitian sebagai referensi ketika memperkaya bahan penelitian dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa jurnal penelitian terdahulu atau tesis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.

1. Benjamin Universitas Atman Jaya Yogyakarta (2013), dengan judul “Peran Pedagang Kaki Lima dalam pengelolaan sebagai upaya pengendalian pencemaran Lingkungan kawasan maliboro Kota Yogyakarta. Membahas Keberadaan Bisnis Pedagang Kaki Lima yang di jalan pada tantangan kota. Lebih menekankan pada Peran Pedagang Kaki Lima dalam pengelolaan limbah agar lingkungan sekitar tidak tercemar.
2. Nur’Ainani Marsonno Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2015) dengan judul Praktek Pedagang Kaki Lima di kawasan Nol kilometer maliboro yogyakarta tinjauan dari segi yuridis dan hukuman Daerah. Membahas tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan tantangan. Lebih mengkhususkan pada tinjauan yuridis pada peraturan.
3. Panca ( 2011) dengan judul “ Resistensi Pedagang Pasar sumber Arta Bekasi Barat” penelitian ini membahas Faktor penyebab resistensi

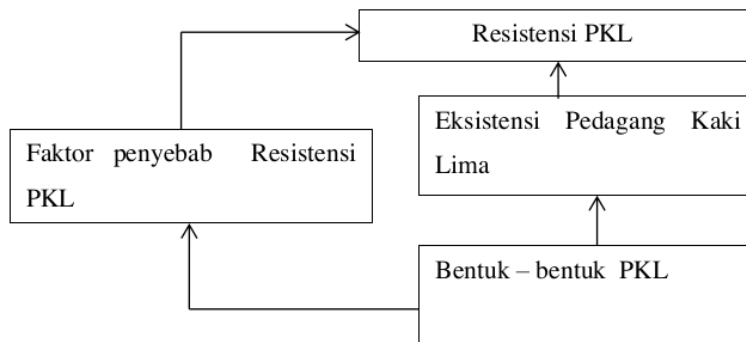
pedagang pasar Sumber arta, mengetahui bentuk – bentuk resistensi pedagang pasar terhadap penggusuran Pasar sumber arta. Resistensi Pedagang Pasar terhadap penggusuran yang terjadi di pasar Sumber Arta dilakukan dalam dua bentuk resistensi yaitu resistensi tertutup dan resistensi semi terbuka. Faktor penyebab Resistensi Pedagang Pasar yaitu: masa hak pakai yang telah berakhir, janji pengelolaan yang belum terealisasi.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran merupakan kerakang konseptual yang memamparkan dimensi – dimensi utama dari penelitian, faktor – faktor kunci, Variabel – variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual Resistensi pedagang kaki lima Terhadap kebijakan pemerintah kota gunugsitoli.

**Gambar. 2.1**

Sumber : Penulis, 2023





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### a. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus kualitatif. Metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya (Mukhtar 2017). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek peneliti misalnya perilaku Pedagang, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2003) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu secara holistik ( utuh atau menyeluruh).

penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus menfokuskan dirinya untuk mengetahui secara umum kasus dari objek studi yang akan menjadi sasaran penelitiannya. Melalui metode kualitatif, peneliti untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menyelidiki latar belakang bentuk – bentuk resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli.

##### 3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

###### 3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Sudirman Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

###### 3.2.2 Jadwal penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, mulai bulan Oktober 2023 sampai maret 2024

Tabel 3.1  
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret										
1	Pengajuan Judul	█	█	█													
2	Bimbingan Proposal		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
3	Seminar Proposal												█				
4	Penelitian													█	█	█	
5	Pengolahan Data															█	█
6	Ujian Skripsi																█

### 3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang benar – benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang kemudian dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa keterangan pertanyaan atau data – data yang dapat membantu dalam memahami persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi atau data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang dipilih menjadi informan dalam penelitian ini orang 5 (Lima) Orang adalah sebagai berikut:

<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tempat Wawancara</b>
Ibu. Putra Lase	Pedagang	Pasar Beringin
Ibu Syukur Gea	Pedagang	Pasar Beringin
Ibu Vina Laia	Pedagang	Pasar Beringin
Ibu Alvin Nduru	Pedagang	Pasar Beringin
Ibu yuman zega	Pedagang	Pasar Beringin

### **3.4 . Variabel Penelitian**

variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2019:68). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal. Menurut sugiyono (2016 :38) mengatakan bahwa variabel tunggal adalah sebagai suatu atribut, sifat atau nilai dari orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian diambil kesimpulannya. Yang menjadi variabel tunggal dalam ini adalah resistensi pedagang kaki lima. Menurut Uha, ismail N ( 2014 : 75). Resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku bersifat eksploitatif dan tidak adil.

Berdasarkan dari pendapatan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel sebagai berikut:

Resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah dengan Indikator:

1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan
2. Persepsi Terhadap Dampak Ekonomi
3. Strategi dan Taktik Resistensi

### **3.5 Sumber Data**

Untuk memperoleh sumber data dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terkait.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen - dokumen, resmi, buku - buku yang sesuai dengan objek peneliti, sikripsi, tesis dan peraturan perundangan - undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli

### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau sosial (sanusi, 2014 : 67).

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti : Peneliti merupakan elemn terpenting didalam penelitian kualitatif karena peneliti harus terjun langsung kelapangan. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. (moleong, 2011 : 168)
2. Panduan wawancara : Wawancara yang akan dilakukan harus menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Pertanyaan yang ditanyakan kepada pedagang kaki lima Di kota gunungsitoli mengukuti yang telah di buat sebelumnya. Pewawancara perlu menyampaikan dengan jelas - jalsnya dan sederhana mungkin dan tidak menyimpan dari panduan wawancara (Nazir, 2011 : 194 dan 196)
3. Studi dokumentasi  
Sebuah penelitian kualitatif memerlukan dokumentasi untuk dianalisis. Dokumentasi yang dianalisis bisa bersal dari diri sendiri atau orang lain. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data s kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek ( Herdinsyah, 2011 : 143)

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis di gunakan dalam penelitian Ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi : Observasi adalah metode pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan. Penelitan akan melihat langsung sebgaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, dan mengumpulkan data dengan mengamat dan mencatat kejadian – kejadian yang terjadi dilapangan secara sistemati. Penelitan juga melihat bagaimana berjalannya proses resistensi perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai apakah berjalan dengan lancar atau tidak.
2. Wawancara : Wawancara adalah proses memperoleh informasi dengan bertata muka dan Tanya jawab dengan responden. Penelitian akan menanyakan langsung beberapa pertanyaan yang ada kaitanya dengan permasalahan dalam penelitian ini kepada pedagang kaki lima di Kota Gungsitoli.
3. Dokumentasi : merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya penting dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, kegiatan organisasi, tata tertib organisasi, dan fungsi organisasi tersebut serta foto dokumentasi kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara

### 3.8 Teknik Analisi Data

Analisis data menurut sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

TekniK analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data pada penelitian ini dimulai sebelum peneliti mengajukan usulan penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara awal atau terlibat langsung. Dari data-data sementara tersebut, penulis telah mengemukakan beberapa fenomena sementara yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data utama akan dilakukan pada saat penelitian di lapangan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan kajian dokumentasi.

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan tema.

## 11 3. Penyajian data

Semua data yang telah di kumpulkan dan dapat di olah oleh peneliti di lapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik kesimpulannya, penyajian data untuk mempermudah pemahaman gambaran data, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk narasi dari data-data yang telah di peroleh sebelumnya.

## 4. Penarikan kesimpulan

Dari langkah-langkah yang di lakukan oleh peneliti di mulai dengan pengumpulan data di lapangan, dengan memilih hal yang pokok dan memfokuskan gambaran mengenai data-data yang di dapat, maka tahap akhir teknis data penelitian ini yaitu mengambil kesimpulan dari semua data yang di peroleh oleh peneliti.

## BAB IV

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Temuan Penelitian

##### 4.1.1 Profil Singkat Pedagang Kaki Lima

Pasar Beringin di Kota Gunungsitoli, 1975. Pada tahun 1975, Salah satu pasar yang ada di kota Gunungsitoli. Pasar tradisional ini menjual berbagai pokok dan sembako seperti beras terigu bawang, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Pasar Beringin Kota Gunungsitoli ini adalah salah satu pasar tradisional penjual pedagang dan pembeli bisa tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. yang memiliki peran serupa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk setempat.

Pasar Beringin di Kota Gunungsitoli yang dibangun pada masa pemerintahan. Kondisi Kota Gunungsitoli sebelum Dalimend memerintah cukup semrawut dan tidak tertata rapi. Bangunan-bangunan yang ada di Gunungsitoli masih beratapkan rumbia sehingga rawan akan bencana kebakaran. Tata letak Kota Gunungsitoli juga kurang baik karena adanya kios-kios yang kumuh dan tersebar tidak teratur.

Pemerintah kemudian meminta bantuan finansial dari sejumlah bank pemerintah seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Bank-bank tersebut menawarkan kemudahan pinjaman berupa angsuran ringan bagi warga yang mengganti atap rumahnya dengan atap seng. Masyarakat dari beberapa desa di sekitar Gunungsitoli lalu dikumpulkan dan diberikan penjelasan mengenai penggantian atap rumbia dengan atap seng. Penggantian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan pinjaman dari bank-bank pemerintah dapat dilunasi.

Pemerintah membangun situs-situs pasar seperti Pasar Gomo, Pasar Gudang Garam, dan Pasar Beringin, sebagai tempat relokasi bagi kios-kios pedagang. Menurut Lalaziduhu Mendröfa, Dalimend beberapa kali turun secara langsung menemui para pedagang untuk meyakinkan mereka bahwa

relokasi diperlukan untuk membangun kota Gunungsitoli. Relokasi tersebut dapat dilakukan dengan lancar dan kios-kios liar di sekitar kota Gunungsitoli dapat dibongkar.

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli melaksanakan pendataan lengkap UMKM di Pasar Beringin eks Terminal Gunungsitoli. Hadir pada saat pelaksanaan pendampingan Kepala Bidang Perdagangan bersama dengan staf. "Benar sudah dilakukan pendataan disana. Dan dari data yang kami miliki ada 218 UMKM di lokasi pasar tersebut. Data yang sama juga sesuai dengan yang dirilis oleh pihak BPS," ujar Kepala Bidang Perdagangan Andy Sofyan Laia SH MH, Jumat (27/10/2023).

Sementara itu, Koordinator Statistik Kecamatan Gunungsitoli Herman Zebua, SE bersama dengan Mitra BPS mengatakan, pengumpulan data UMKM ini meliputi yang omsetnya 5 M ke bawah dan untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan pedagang di pasar Beringin.

"Pastinya kita mendukung bahwa pendataan lengkap UMKM kepada para pedagang pasar yang ada di Pasar Beringin eks Terminal ini sebagai upaya mendorong terciptanya basis data UMKM di Kota Gunungsitoli,

#### **4.1.2 Kebijakan Perda PKL Kota Gunungsitoli**

Membatasi ruang gerak yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dalam bentuk pemberian izin lokasi usaha. Para pejabat kota dan kaum elite lokal biasanya memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat, gangguan pejalan kaki dan saingan pedagang yang tertib. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan kebijakan bagi para pelaku sektor ekonomi informal.

Kebijakan terhadap PKL perlu seimbang antara mendukung keberlangsungan usaha mereka dan menjaga ketertiban umum. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari keberadaan PKL,



sambil tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi PKL dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian pelatihan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan mereka secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

<sup>1</sup> Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang – barang dagangan. Apabila pedagang kaki lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk pedagang kaki lima, penertiban dilakukan agar pedagang kaki lima tidak melampaui batas-batas yang telah di tentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan perda pedagang kaki lima di tertibkan dengan cara di pindahkan ke tempat yang telah di tentukan.

<sup>1</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota, dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Perundang-undangan Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1) yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli nomor 11 Tahun 2000 adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kota Gunungsitoli tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kota Gunugsitoli Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman, perlu melakukan pengaturan dan pembinaan. Sesuai dengan Bab II pasal 2 tentang Pengaturan Tempat Usaha dibentuk karena merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lingkungan sekitar.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2000 sesuai dengan pasal 3 adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima, pengaturan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2000 di muat mengenai penetapan lokasi dan waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima, izin usaha pedagang kaki lima, kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima, pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, dan pemberian sanksi administrasi pedagang kaki lima.

Sesuai dengan Bab V pasal 6, 7, dan 8 hak kewajiban dan larangan pedagang kaki lima yaitu : Setiap PKL mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan perijinan;
2. Penyediaan lahan lokasi PKL;
3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan:

1. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan.
2. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
3. Mencengah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
4. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.
5. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang :

1. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan.
3. Memindah tangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
4. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
5. Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

Walikota berwenang untuk mengatur dan menempatkan pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga memuat mengenai izin usaha bagi pedagang kaki lima, sesuai dengan Bab III pasal 4 yaitu:

1. Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud  
Pasal 2 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dikenai biaya.
3. Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
4. Persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan oleh instansi khusus yang ditunjuk oleh Walikota dan dapat melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan Paguyuban PKL serta masyarakat di sekitar lokasi usaha pedagang kaki lima. Apabila pedagang kaki lima melalaikan kewajiban, hak, dan larangan akan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis, pencabutan izin, dan pembongkaran saran usaha pedagang kaki lima.

Pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dilakukan oleh Walikota. Pengaturan dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan Bab VI Pasal 9 meliputi pembinaan yang diberikan oleh pemerintah untuk pedagang kaki lima.

#### 4.13 Jumlah Pedagang Kaki Lima

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Kurang Lebih 100 Jiwa Pedagang Kaki lima di Pasar Beringin Gunugsitoli

Jenis Barang yang di jual pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gungsitoli Dan Lokasi Penelitian

No	Jenis Barang Dagangan	Lokasi Penelitia
1	Sayur – sayuran	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
2	Ikan	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
3	Tahu/tempe	Pasar Beringin Kota Gununsigtoli
4	Makanan/ minuman	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
5	Martaba Telur	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
6	Alat – alat dapur	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
7	Cabe/ Bawang	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
8	Buah – buahan	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
9	Ubi	Pasar Beringn Kota Gunungsitoli

Berdasarkan Informan merupaka seseorang yang benar – benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang kemudian dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa keterangan pertanyaan atau data – data yang dapat membantu dalam memahami persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, penelitan memilih informan penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi atau data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang dipilih menjadi informan dalam penelitian ini orang 5 (Lima) Orang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci**

Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Tempat Wawancara
Ibu. Putra Lase	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Ibu Syukur Gea	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Ibu Vina Laia	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Ibu Alvin Nduru	Pedagang	1 November	Pasar Beringin

Ibu yuman zega	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
----------------	----------	------------	----------------

<sup>1</sup> Saranan yang digunakan pedagang kaki lima di pasar beringin antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.3

Saranan yang digunakan pedagang kaki lima di pasar beringin Kota Gunungsitoli

No	Saranan Berjualan
1	Papan
2	Plastik
3	Trapal
4	Meja dan kursi
6	Mobil

#### 4.1.3 Resistensi Pedagang Kaki Lima

. Resistensi yang dilakukan diantaranya seperti tetap berdagang di pasar trotoar sehingga melakukan kegaduhan di pasar beringin Kota Gunungsitoli yang bermunculan terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli PKL disekitar trotoar bahwa kebijakan pemerintah kota Gunungsitoli yang dibuat oleh pemerintah Menurut Pedagang kaki Lima sangat merugikan pedagang.

#### <sup>1</sup> 4.1.4 Faktor Penyebab Penolakan

Keberadaan pedagang kaki lima seakan – akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut.

Ubarnisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang kaki lima Legal, yaitu pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan pedagang kaki lima binaan pemerintah.
2. Pedagang kaki lima Ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki usaha.

Pedagang kaki lima yang bersifat legal biasanya menempati Lokasi yang di tentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang di gunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan pedagang kaki lima Ilegal. Pedagang kaki lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak di tentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Pedagang kaki lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Lokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gunungsitoli legal yang telah di tentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di pasar beringin termasuk pedagang kaki lima ilegal karena mereka menempati daerah larangan pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima yang berjualan perlengkapan rumah tangga seperti menggunakan tempat Ember Plastik sebagai tempat untuk menaruh barang – barang yang akan di jual. Ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung yang datang ketempat tersebut. Menggunakan mobil tempat berjualan sayuran Sedangkan penjualan makanan biasanya menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang. Gerobak berfungsi sebagai alat yang di gunakan

untuk meletakkan makanan yang akan di jual sedangkan kursi disediakan untuk pembeli.

Pedagang kaki lima di pasar beringin sadar betul bahwa lokasi yang mereka tempati untuk berjualan adalah kawasan terlarang bagi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak mempunyai pilihan lain meskipun mereka sering ditertibkan, mereka akan tetap bertahan berjualan di pasar beringin. Pedagang kaki lima di pasar beringin sudah mendapatkan tempat relokasi di pasar pagi, namun masih banyak pedagang kaki lima yang kembali berjualan di tempat semula yaitu di trotoar jalan. Hal ini mereka lakukan karena mereka hanya mempunyai satu tempat berjualan di trotoar pasar beringin dan tidak mempunyai tempat lain sebagai tempat untuk berjualan. Alasan pedagang kaki lima memilih tempat ini untuk berjualan adalah tempat ini ramai oleh pengunjung.

Pedagang kaki lima di pasar beringin Mengaku pasrah jika suatu ketika tempat mereka berjualan akan ada penertiban maupun pengurusan. Pada dasarnya para pedagang kaki lima di pasar beringin merasa sebagai pihak yang lemah sehingga walaupun harus melawan mereka pikir sia – sia saja, sehingga mereka lebih memilih bersikap pasrah saja kalau memang mereka harus di tertibkan. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang Ibu Putra (PKL Pasar beringin) sebagai berikut.

Pedagang Kaki lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima yang satu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas satol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para pedagang kaki lima

akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para pedagang kaki lima.

#### **4.1.5. Bentuk-bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima**

menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, Pedagang Kaki Lima yang disatu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para Pedagang Kaki Lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para Pedagang Kaki Lima. Upaya pemerintah Kota Semarang dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki Lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: 1. Tetap Berjualan Bertahannya Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tetap berjualan di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai tempat untuk bekerja.

#### **4.1.6 Menolak Relokasi**

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam Pedagang Kaki Lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Relokasi merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang positif



dari para Pedagang Kaki Lima. Karena tidak semua Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di daerah larangan Pedagang Kaki Lima dan nekad berhadapan langsung dengan para petugas yang menertibkan mereka.

Alasan menolak relokasi karena relokasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak cenderung, kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu vina PKL di pasar beringin.

Penelitian di temukan bahwa penolakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru di anggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan di tempati oleh pedagang kaki lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi pengunjung para pedagang kaki lima tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, apa bila pedagang kaki lima di pindah di lokasi baru besar kemungkinan pedagang kaki lima kehilangan pelanggannya. Oleh kerena itu, pedagang kaki lima melakukan penolakan bila dipindahkan kelokasi yang baru.

#### **4.1.7 Tetap Berjualan Di Trotoar**

banyak pedagang kaki lima, berjualan di trotoar adalah cara utama untuk menghasilkan pendapatan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki modal atau sarana untuk membuka usaha di tempat lain yang lebih formal. Dalam hal ini, trotoar adalah tempat yang mudah diakses dan memungkinkan mereka untuk mencari nafkah. Trotoar sering kali berlokasi di pusat kota atau area yang ramai, sehingga memberikan aksesibilitas yang baik bagi pedagang untuk menarik pelanggan. Keberadaan mereka di trotoar dapat dianggap sebagai strategi untuk menempatkan usaha mereka di lokasi yang lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Beberapa pedagang kaki lima mungkin menghadapi keterbatasan dalam memperoleh tempat berjualan alternatif. Terkadang, fasilitas formal seperti pasar tradisional mungkin terlalu mahal atau tidak memadai bagi pedagang dengan modal terbatas.

Dalam konteks ini, trotoar menjadi opsi yang lebih terjangkau. Di beberapa tempat, berjualan di trotoar telah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang dan konsumen sering terlibat dalam hubungan yang sudah mapan di trotoar, dan perubahan tempat berjualan dapat mengubah dinamika ini. Pemerintah Melakukan penegakan peraturan yang lemah terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di trotoar. Hal ini bisa menjadi faktor yang mempermudah mereka untuk terus berjualan di Ssana, terlepas dari aturan yang mungkin melarangnya.

#### 4.2.1 Hasil Wawancara

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian secara Langsung Informan kunci dan Informan pendukung yaitu untuk mengetahui tentang Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan Tujuan Penelitian wawancara dilakukan peneliti pada tempat penelitian secara langsung dengan menjumpai Informan kunci dan Informan Pendukung yaitu Pihak yang Mengetahui tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli, Informasi tersebut untuk menggali data internal dan eksternal, sehingga memperoleh data yang akurat dari hasil wawancara yang mendalam (in-depth interview) yang telah dilakukan peneliti pada ibu . putra sebagai Pedagang Kaki Lima Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Pada Tanggal 3 November 2023 tentang Analisis Resistensi Pedagang Kakilima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan Beliau mengungkapkan Bahwa:

Berikut ini banyaknya Pedagang Kaki Lima Di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli adalah 100 (Seratus) Jiwa Lebih berdasarkan Hasil Wawancara dengan beberapa informan, Peneliti mencoba menanyakan beberapa hal terkait tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Sesuai Draf Wawancara yang sudah tersedia, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi utama alasan Ibu sebagai pedagang kaki lima untuk menolak kebijakan pemerintah terkait lokasi berjualan di trotoar?  
Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Putra Lase Pedagang kaki lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

Menyatakan:

Bahwa” di Pasar Beringin /di Trotoar ini mudah diakses oleh pembeli, di pasar Beringin atau totoar ini banyak pelanggan saya Jika saya pindah lokasi, Pelanggan saya akan pindah ke pedagang kaki lima yang lain maka dapat mengurangi pembeli kepada saya”.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pasar Beringin atau trotoar di lokasi tersebut dianggap mudah diakses oleh pembeli. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar atau kegiatan pedagang kaki lima di tempat tersebut memiliki keuntungan aksesibilitas yang tinggi.

2. Apakah Ibu Merasa Kebijakan Pemerintah tersebut Adil dan Menguntungkan Bagi Usaha Saudara? Jika Tidak Mengapa Ibu

Merasa Bertahan Berjualan Pada Tempat ini?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Putra Lase Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Kebijakan Pemerintah Tidak Adil dan Tidak Menguntungkan Usaha kami, kami bertahan di Pasar Beringin ini, Bahwa saya tau betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun seringkali saya dan teman – teman Pedagang Kaki Lima lain di tertibkan oleh petugas namun, bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu – satunya Pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai Pedagang Kaki Lima. Mau tidak mau, setelah ada penertiban, saya pasti kembali berjualan di sini seperti biasanya karena ini satu – satunya cara saya mencari nafkah untuk menghadapi keluarga saya.”

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, bahwa berjualan di pasar Beringin adalah satu-satunya pekerjaan yang dimilikinya menunjukkan kesulitan dalam menemukan alternatif pekerjaan. Ini

mencerminkan keterbatasan pilihan ekonomi yang dihadapi oleh pedagang kaki lima.

3. Bagaimana Pandangan Ibu Terhadap aturan yang mengatur keberadaan Ibu di trotoar dan mengapa Ibu tetap bertahan untuk berjualan di trotoar? Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Syukur Gea Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan :

Bahwa saya tersebut banyak pelanggan saya dan saya sudah bertahun tahun berjualan di pasar Beringin, Pelanggan banyak memilih untuk berbelanja di pasar beringin jika saya mematuhi kebijakan pemerintah maka dagangan saya kurang laku.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelanggan banyak memilih untuk berbelanja di pasar Beringin menandakan bahwa pasar tersebut memiliki daya tarik atau keunggulan tertentu yang membuat pelanggan memilih untuk berbelanja di sana. Mungkin ada faktor-faktor seperti kenyamanan, variasi produk, atau harga yang membuat pasar tersebut diminati oleh pelanggan.

4. Bagaimana Pandangan Ibu terhadap Kebijakan pemerintah yang mungkin menjadi alasan Penolakan Ibu di Pasar Beringin tersebut?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Syukur Gea Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan :

Saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang berjualan di trotoar atau di Pasar Beringin. Karena ada ketidaksetujuan terhadap alasan-alasan di balik kebijakan tersebut, seperti ketidakjelasan regulasi, ketidakadilan, atau kurangnya alternatif yang memadai.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tersebut menunjukkan perluasan pandangan pedagang terhadap kebijakan pemerintah dan alasan-alasan di baliknya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk dialog atau

advokasi yang lebih baik antara pemerintah dan pedagang kaki lima guna mencapai kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. Apa masalah yang konkret yang di hadapi Ibu dalam berdagang di pasar Beringin yang mungkin menjadi penyebab penolakan kebijakan Pemerintah?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Sykur Gea Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Karena Kebijakan Pemerintah terdapat ketidak pastian terkait aturan dan Pengelolaan yang mengatur kegiatan berjualan di Pasar Beringin. Jika aturan tidak jelas atau sulit dipahami, Kami Sebagai Pedagang Kaki Lima mungkin kesulitan mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kejelasan, transparansi, dan pemahaman terkait aturan dan pengelolaan kegiatan berjualan di Pasar Beringin. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pedagang, serta penyediaan panduan yang jelas, dapat membantu mengatasi masalah ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

6. Apa Masalah Benar – Benar yang dihadapi terhadap Kebijakan Pemerintah yang menjadi penyebab Penolakan Ibu?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Vina Laia Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Salah satu masalah yang Kami hadapi adalah kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi berjualan di Pasar Beringin. Jika berdagang di pasar tersebut adalah satu-satunya sumber pendapatan utama ibu, kebijakan tersebut bisa sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup keluarganya. Karena Penolakan terhadap kebijakan pemerintah mungkin juga muncul karena saya merasa sulit atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya jika tidak diperbolehkan berjualan di Pasar Beringin. Ini bisa mencakup kebutuhan dasar seperti

makanan, pendidikan anak-anak, dan biaya kesehatan dan kami sebagai pedagang kaki lima tidak di hargai.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan Pedagang mengindikasikan bahwa berdagang di Pasar Beringin merupakan satu-satunya sumber pendapatan utama bagi keluarganya. Ketergantungan ini membuat kebijakan larangan berjualan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi keluarga tersebut.

7. Apakah ada Pilihan Lokasi atau solusi lain yang diusulkan oleh pemerintah untuk Mendukung aktivitas Ibu sebagai Pedagang Kaki Lima tanpa melibatkan Trotoar jika pemerintah memberikan solusi mengapa ibu menolak kebijakan pemerintah tsb?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Vina Laia Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan :

Pemerintah Memberikan lokasi alternatif yang terorganisir, seperti kios-kios kecil atau lapak-lapak namun Jika kami merasa bahwa solusi yang diusulkan tidak memberikan kesetaraan dalam peluang ekonomi, misalnya, jika pasar yang diusulkan kurang menarik pelanggan dibandingkan lokasi sebelumnya, ia mungkin merasa kebijakan tersebut tidak menguntungkan.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pedagang melakukan evaluasi terhadap solusi yang diusulkan, terutama dalam hal kesetaraan peluang ekonomi. Jika solusi tersebut tidak memberikan peluang ekonomi yang setara atau menarik pelanggan sebanding dengan lokasi sebelumnya, pedagang dapat merasa kebijakan tersebut tidak menguntungkan.

8. Bagaimana Respon Ibu Terhadap Kebijakan Pemerintah yang Mungkin memerlukan adaptasi atau penyesuaian dalam operasional ibu?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Alvin Ndruru Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Jika kebijakan tersebut memberikan tantangan praktis atau teknis dalam implementasinya, saya merespon dengan kekhawatiran atau frustrasi. Tantangan ini dapat berupa perubahan dalam lokasi berjualan, penyesuaian terhadap aturan tertentu, atau pemenuhan persyaratan administratif yang baru.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pedagang merespon dengan kekhawatiran atau frustrasi terhadap tantangan yang dihadapi. Ini mencerminkan dampak emosional dari perubahan kebijakan terhadap pedagang kaki lima yang harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.

9. Mengapa Ibu melakukan Resitensi terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Alvin Ndruru Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “<sup>4</sup>Karena sepi nya pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan kami kurang laku dan akhirnya membuat kami nekat untuk kembali berjualan di pasar beringin.”

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pedagang menyoroti adanya tantangan praktis atau teknis yang muncul dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat mencakup perubahan lokasi berjualan, penyesuaian terhadap aturan baru, atau pemenuhan persyaratan administratif yang berubah.

10. Apa yang mendorong atau menghambat Ibu untuk mematuhi kebijakan tersebut?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Yuan Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Saya merasa bahwa kebijakan tersebut menciptakan ketidaksetaraan peluang ekonomi, di mana lokasi alternatif yang disediakan tidak sebanding dengan daya tarik dan pelanggan di tempat berjualan sebelumnya”.

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tersebut mencerminkan ketidaksetujuan pedagang terhadap dampak kebijakan yang dianggap merugikan, khususnya dalam konteks ketidaksetaraan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh perubahan lokasi berjualan.

#### 4.2.2 Hasil Analisa Data

Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak tunduk kepada perintah relokasi dari Pemkot bisa dipandang sebagai resistensi para pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima. Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Beringin, dapat juga bersifat positif, karena penolakan dan penolakan yang mereka lakukan diduga dapat mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Gunungsitoli.

Penolakan non kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan dengan cara melakukan demonstrasi damai, berorasi, membuat pamflet atau poster, hingga mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.

Upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan pedagang kaki lima memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan di tertibkan. Bagi pedagang kaki lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertua dalam perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Gunungsitoli Menggelar Konferensi Pers dalam Rangka Menyampaikan Program Pemerintah Kota Gunungsitoli, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum, dan juga tentang hal yang terjadi atau yang lagi Viral dimedia sosial antara Pedagang Kaki Lima



dan satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua Mengatakan “mengenai insiden yang terjadi di Pasar Beringin itu adalah situasional, dimana petugas Lapangan juga mempunyai. Dan setelah saya melihat Video yang sebenarnya atau seutuhnya maka disana terlihat jelas bahwa awalnya petugas telah menempuh jalur persuasif, namun oknum pedagang tersebut melawan dan memegang leher petugas, mencaci maki bahkan mengeluarkan kata – kata pengancaman kepada petugas. Dan bukti video seutuhnya itu sudah kita sarahkan kepada pihak penyidik” seterusnya “ tidak ada pemecatan, bahkan saya sudah melaporkan kepada pihak berwajib atas penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum pedagang tersebut. Walikota juga mendukung sepenuhnya petugas di lapangan untuk penegakkan perda demi ketertiban umum.

Masih ditemukan beberapa Pedagang Kaki Lima di pasar beringin Kota Gunungsitoli yang menggunakan trotoar, bahu jalan dan fasilitas umum, sehingga beralih fungsi menjadi kepentingan Ekonomi Yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, pejalan kaki, dan kebersihan Lingkungan. Satpol PP Kota Gunungsitoli secara terus menerus melaksanakan penertiban pedagang kaki lima tersebut, dengan mengedepankan sisi kemanusiaan melalui pendekatan secara persuasif dan edukatif. Disampaikan Kabid Ketertiban Umum dan ketentrangan Masyarakat Satpol PP Kota Gunungsitoli Emilia Gulo, SE, bahwa petugas tidak serta serta melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar, sudah berulang kali melaksanakan pengawasan, sosialisasi baik secara lisan maupun tulis kepada para pelaku pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan fasilitas umum diwilayah Kota Gunungsitoli, namun saja tidak di indahkan.

Ratusan Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin yang digusur melakukan demonstrasi di depan Kantor Walikota Gunungsitoli. Mereka menyampaikan agar Lakhomizaro Zebua berikan Solusi terhadap pedagang Pasar Beringin yang telah digusur. Kami yang bergabung pada “Aliansi Pedagang Kaki Lima Bersatu” dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam pembubaran PKL dikawasan Pasar Beringin secara represif dan tidak manusiawi.
2. Hentikan perlakuan represif dan tidak manusiawi kepada warga sebagai solusi prioritas mengatasi masalah ketertiban umum.
3. Menolak Tempat relokasi yang jauh tidak strategis dan tidak bisa menampung seluruh para pedagang yang ada
4. Kalau untuk menata kota, kami tidak keberatan asalkan, Pemerintah mampu menyediakan tempat yang strategis untuk kami para Pedagang Kaki Lima
5. Meminta kepada Bapak Walikota Gunungsitoli untuk menampung dan memfasilitasi tempat yang layak untuk kami para pedagang Kaki Lima, karena hal itu merupakan bentuk pembinaan dalam membantu Ekonomi Rakyat.
6. Meminta Kepada Bapak Walikota Gunugsitoli, untuk meninjau ulang kebijakan pemerintahan dan melihat kesiapan tempat baru serta kelayakan untuk berdagang.
7. Mendesak Walikota Gunungsitoli, untuk segera mencopot Kadis Perindag, karena tidak mampu memberi solusi.
8. Meminta Walikota Gunungsitoli, untuk mencopot Kasatpol PP Kota Gunungsitoli karena terkesan arogan tidak manusiawi saat menertibkan kami para Pedagang Kaki Lima.
9. Jika Tuntutan kami ini tidak diindahkan dalam 3x24 Jam, maka kami akan kembali melaksanakan aksi dengan masa yang lebih besar.

Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah di gusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan di perolehnya di tempat tersebut. Terdapat tempat – tempat tertentu yang menurut penilaian pedagang kaki lima paling dapat membrikan pendapatan yang tinggi bagi para pedagang kaki lima. Tindakan yang di lakukan oleh petugas satpol PP sebagai instansi penegak perda sesuai prosedur maka satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus – menerus

(bersama kelurahan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, maupun POLRI).

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima akan diberi waktu untuk pindah atau membongkar secara mandiri (dengan jaminan surat pernyataan), apabila masih dilanggar maka pedagang kaki lima yang bersangkutan akan di beri sanksi pidana atau pemberkasan dengan ancaman hukuman kurang paling lama 6 bulan atau denda paling banyak rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) sesuai dengan perda No. 11 Tahun 2000 pasal 12 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang kaki lima.

Setelah penertiban, diadakan patroli atau pengawasan yang dilakukan secara menerus oleh Satpol PP dan pihak terkait baik dari kelurahan, Dinas pasar, maupun POLRI. Petugas dalam melakukan penertiban juga seringkali mengalami berbagai kesulitan antar lain yaitu:

1. Para Pedagang Kaki Lima Kembali berjualan setelah petugas pergi.)
2. Adanya penolakan Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata di tempat yang baru yang telah disediakan oleh pemerintah penataan ditentukan oleh dinas pasar,
3. Tidak jarang ada pedagang Kaki Lima Menangis minta dikasihani karena mata pencahariannya hanya berjualan.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang pengaturan dan pembinaan mengakui keberadaan pedagang kaki lima dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku pedagang kaki lima itu sendiri.

Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Dimana ada keramaian, maka disitu pedagang kaki lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di pasar beirngin banyak sekali pedagang kaki lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan. Penertiban sering dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan

kesemuarawatan yang diebabkan oleh para pedagang kaki lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan petugas secara terus menerus. Pedagang kaki lima bukannya berkurang malah semakin bertambah.

#### 4.2.3 Pembahasan

Indikator Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima

1. Menurut (Ford & Ford, 2009: 26009) Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Tindakan formal pemerintah memiliki dampak signifikan pada masyarakat, oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk memecahkan masalah dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Bedasarkan Teori Menurut Dawson, P. (2003) menyatakan bahwa indikator resistensi adalahh “Perlawanan Terbuka atau Kritik Terhadap Perubahan: Individu atau kelompok yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan atau kritik terhadap perubahan, baik melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung” artinya Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan adalah ketika individu atau kelompok dengan jelas menyatakan ketidaksetujuan atau memberikan kritik terhadap perubahan yang sedang berlangsung dalam organisasi. Hal ini dapat terjadi melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung antara mereka dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara Dengan ibu Putra, tindakan formal pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kelangsungan hidup usaha kami dan penghidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa tindakan formal tersebut mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kami sebagai anggota masyarakat yang berusaha mencari nafkah melalui usaha dagang Kami.

Selanjutnya Ketika diterapkan pada konteks pedagang kaki lima, ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan kebijakan pemerintah, seperti regulasi baru atau kebijakan yang mempengaruhi bisnis mereka. Mereka dapat melakukan perlawanan terbuka dengan menyatakan ketidaksetujuan mereka melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, resistensi pedagang kaki lima mencerminkan reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu Ibu Heni Gea juga Menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah merugikan bisnis Kami, kami melakukan bentuk perlawanan terbuka atau memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, Indikator bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tindakan formal mereka kepada kami. Transparansi memungkinkan kami memahami aturan dan kebijakan yang berlaku, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak terjadi secara tersembunyi.

2. Menurut (Oreg, Vakola, dan Armenakis, 2011 : 69) penolakan terhadap kebijakan pemerintah : Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap atau tindakan dari pedagang kaki lima dalam menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan dan tidak adil bagi kepentingan mereka.

Ketika pedagang kaki lima merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka, atau bahkan berdampak negatif pada usaha dan pendapatan mereka, maka mereka cenderung menolak dan membantah kebijakan tersebut. Menyoroti pentingnya pandangan dan persepsi pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari kelompok pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau adil bagi mereka. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat kaki lima dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Pengakuan dan pengertian terhadap pandangan dan keluhan mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak yang terdampak. menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan kelompok pedagang kaki lima dapat membuka peluang untuk mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih adil. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pedagang kaki lima, akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Persepsi adil atau tidaknya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan, perlakuan yang adil dari pemerintah, dan dampak kebijakan tersebut pada kondisi kehidupan pedagang kaki lima.

Berdasarkan teori di sampaikan Menurut Paraahli Anwar Prabu Mangkunegara (2009:93) Indikator, Penolakan ini mencerminkan ketidaksetujuan dan ketidakpuasan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil. Pedagang kaki lima mungkin merasa bahwa kebijakan tersebut membahayakan usaha mereka, mengurangi pendapatan, atau menciptakan hambatan-hambatan bagi kelangsungan bisnis mereka. Dalam menolak kebijakan tersebut, pedagang kaki lima dapat mengambil berbagai tindakan, seperti mengorganisir protes, mogok, menolak mentaati regulasi yang diterapkan, atau bahkan mengajukan petisi atau kampanye untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk resistensi yang bisa mencakup berbagai strategi, dari tindakan perorangan hingga upaya kolaboratif bersama komunitas atau organisasi yang memiliki kepentingan serupa. Tujuan dari penolakan ini adalah untuk melindungi kepentingan pedagang kaki lima dan memperjuangkan kebijakan yang lebih

mendukung pertumbuhan bisnis mereka serta keadilan dalam lingkungan usaha.

Berdasarkan Hasil Penelitian Wawancara dengan Ibu Putra Lase bahwa kebijakan Pemerintah tidak memberikan perlakuan adil atau merugikan kelompok Kami secara khusus, kami dapat menolak kebijakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Berdasarkan wawancara Menurut Ibu Vina Laia Kami sering menghadapi masalah hukum terkait dengan tempat berjualan kami. Kebijakan penggusuran atau pembatasan lokasi berjualan dapat menimbulkan penolakan karena hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup bisnis kami.

Selanjutnya, Pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari ekonomi informal, memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan layanan kepada masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pedagang kaki lima menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi, ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah, serta ancaman penggusuran dan tantangan hukum. Kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan pandangan mereka dapat menyulitkan kelangsungan hidup bisnis mereka. Pedagang kaki lima bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga anggota masyarakat yang aktif secara sosial dan budaya. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi lokal dan membangun jaringan sosial dalam komunitas mereka. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kebutuhan pedagang kaki lima dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan dukungan, pelatihan, akses ke pasar, dan memperhitungkan kebijakan yang adil bagi pedagang kaki lima dapat membantu meningkatkan kondisi hidup mereka. Studi lanjutan tentang pedagang kaki lima dan interaksi mereka dengan kebijakan pemerintah diperlukan untuk memahami dinamika ekonomi informal secara lebih mendalam. Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang

lebih efektif dan inklusif untuk mendukung pedagang kaki lima dan sektor ekonomi informal lainnya. Berdasarkan wawancara Menurut Ibu Lina Laia kami merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan perlakuan adil atau merugikan kelompok kami secara khusus, kami dapat menolak kebijakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang kami alami. Dengan demikian, hasil penelitian oleh peneliti lapangan Resistensi pedagang kaki lima di pasar beringin

Berdasarkan Hasil observasi di lapangan dengan wawancara Ibu Putra Lase Kami sering kali menyampaikan ketidaksetujuan kami melalui protes dan demonstrasi. Kami dapat berkumpul di tempat-tempat umum, mengadakan unjuk rasa, atau mogok berjualan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang Kami anggap merugikan. Pedagang kaki lima dapat menunjukkan resistensi dengan tidak mematuhi kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya, kami mungkin terus berjualan di lokasi-lokasi yang telah dilarang oleh pemerintah, mengabaikan pembatasan jam operasional, atau tidak membayar pajak yang diberlakukan.

#### **4.2.3 Mengatasi Resistensi PKL Terhadap Kebijakan Pemerintah**

Berdasarkan Untuk Mengatasi Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Yaitu:

1. Dialog dan Konsultasi, Adakan dialog terbuka antara pemerintah dan para pedagang kaki lima. Dengan mendengarkan masukan dan kekhawatiran mereka, pemerintah dapat memahami perspektif pedagang dan mencari solusi bersama.
2. Sosialisasi Kebijakan, Lakukan sosialisasi yang efektif terkait kebijakan yang diterapkan. Pastikan para pedagang memahami tujuan kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Transparansi dalam penyampaian informasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian.
3. Pertimbangan Ulang, Kebijakan Jika memungkinkan, pertimbangkan ulang kebijakan yang dianggap memberikan dampak negatif pada pedagang kaki lima. Evaluasi kembali regulasi atau perizinan yang mungkin memberikan beban berlebih bagi mereka.



4. Program Dukungan dan Pelatihan, Sediakan program dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pedagang kaki lima. Ini dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan meningkatkan kualitas usaha mereka.
5. Partisipasi Pedagang dalam Pengambilan Keputusan, Libatkan pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan memengaruhi mereka. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
6. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan, Lakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap dampak kebijakan terhadap pedagang kaki lima. Dengan memahami konsekuensi kebijakan, pemerintah dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan.
7. Program Kesejahteraan Sosial, Sediakan program kesejahteraan sosial bagi pedagang kaki lima yang mungkin terdampak langsung oleh perubahan kebijakan. Ini dapat membantu melindungi mereka dari dampak ekonomi yang merugikan.

Melibatkan pedagang kaki lima dalam proses pembuatan kebijakan, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menyediakan dukungan yang sesuai adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan di mana mereka dapat beroperasi secara berkelanjutan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pasar beringin Kota Gunungsitoli maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Di pasar Beringin memiliki komponen Kunci. Faktor yang melatar belakangi perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima telah membayar sejumlah uang namun, penertiban terus-menerus dilakukan oleh petugas. Hal ini yang membuat Pedagang Kaki Lima merasa diperlakukan tidak adil, Pedagang Kaki Lima beranggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk tetap berjualan di tempat semula karena mereka telah membayar sejumlah uang. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: satu, tetap berjualan dua, menolak relokasi tiga, menyembunyikan barang dagangan, dan empat, bersembunyi (kucing-kucingan) dengan petugas. Mengenai kelembagaan Pedagang Kaki Lima di dua tempat yang diteliti tidak mempunyai paguyuban resmi, namun ada pihak yang mengkoordinir para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan aktivitasnya ditempat tersebut.

#### 5.2 Saran

Bagi pemerintah adalah pemerintah harus tegas dan adil terhadap Pedagang Kaki Lima. Bagi Pedagang Kaki Lima harus disiplin, menjaga kebersihan dengan baik dan mendirikan paguyuban yang resmi. Dengan adanya paguyuban yang resmi, akan mempermudah baik bagi pemerintah maupun Pedagang Kaki Lima dalam menjembatani antara keinginan pemerintah dengan kemauan Pedagang Kaki Lima.

#### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan Pada pengalaman langsung peneliti Kelapangan dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih di perhatikan bagi peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitian karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus di perbaiki kedepannya. keterbatasan dalam penelitian tersebut:

Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden terkadang banyak pedagang yang tidak mau diwawancarai sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2005) kajian lokasi pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima serta persepsi masyarakat sekitar di kota pematang.undip; semarang
- Dewi Septiana. 2011. Resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota semarang (Studi kasus pkl di jalan krosono dan jalan kartini timur) UNNES; Semarang.
- Edi Suharto ; (2005 :8 ) Analisis Kebijakan Publik, panduan Praktis mengkaji masalah sosial dan kebijakan sosial, penerbit CV. Bandung
- Ford, J. D., & Ford, L. W. (2009). Kritik Terhadap Perubahan: Mengidentifikasi dan Mengatasi Resistensi dalam Organisasi. *Journal of Applied Behavioral Sci*(Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2009). Ketidakpatuhan atau Ketidakaktifan: Indikator Resistensi terhadap Perubahan. Dalam Dunford, R., Palmer, I., & Benveniste, J. (Eds.), *Resistance and Change in the Corporate America* (hal. 123-135). New York: Routledge
- Handoyo, E. 2012 Eksistensi pedagang kakilima (studi tentang kontribusi Modal Sosial terhadap resistensi PKL disemarang ). Saltiga: universitas kristen satya wacana.
- Hierchheim, R dan Newman, M. 1998. Information System and User Resistance: Theory and Practice. *Computer Journal*. Pp. 398-408
- Herdinsyah, Haris, 2011. Metodologi Penelitian kualitatif untk ilmu- ilmu sosial. Jakarta:Salemba Humanika.
- Jurnal "Employee Resistance and Change Implementation" oleh Cynthia S. Arbaugh dan Gary W. Selnow (2005).
- Lumbantoruan, dkk. M., Tewal, B., Lumintang, G. 2021 Faktor – faktor yang Menyebabkan resistensi terhadap perubahan organisasi di pasar (persero Integrated Terminal bintang. *EMBA: Jurnal riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, vol 9(1): hal- 914-923.
- McGee dan Yeung, 2014, Teori Administrasi pblk. Bandung: Alfabeta..

<sup>3</sup> Moleong, L. L, 2003. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mentari, S, Y., Syahar. F 2018. Partisipasi pedagang kaki lima dalam pengelolaan Sampah Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi, Jurnal Buana, Vol 2(5): hal 328 – 337.

Mufidah, A. (2020). Polemik polemik kebijakan pemerintah Hukum dan keadilan, 4(1), 159 – 166.

Mukhtar. 2017 Metode praktis penelitian Deskriptif. Jakarta :GPS pers grub

<sup>3</sup> Moleong, L. L, 2003. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Narasumber: Buku "The Story of Resistance to Change in Organizations: A Situated Rhetorical Analysis" oleh David M. Boje (2001).

Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2009). Ketidakpatuhan atau Ketidakaktifan: Indikator Resistensi terhadap Perubahan. Dalam Dunford, R., Palmer, I., & Benveniste, J

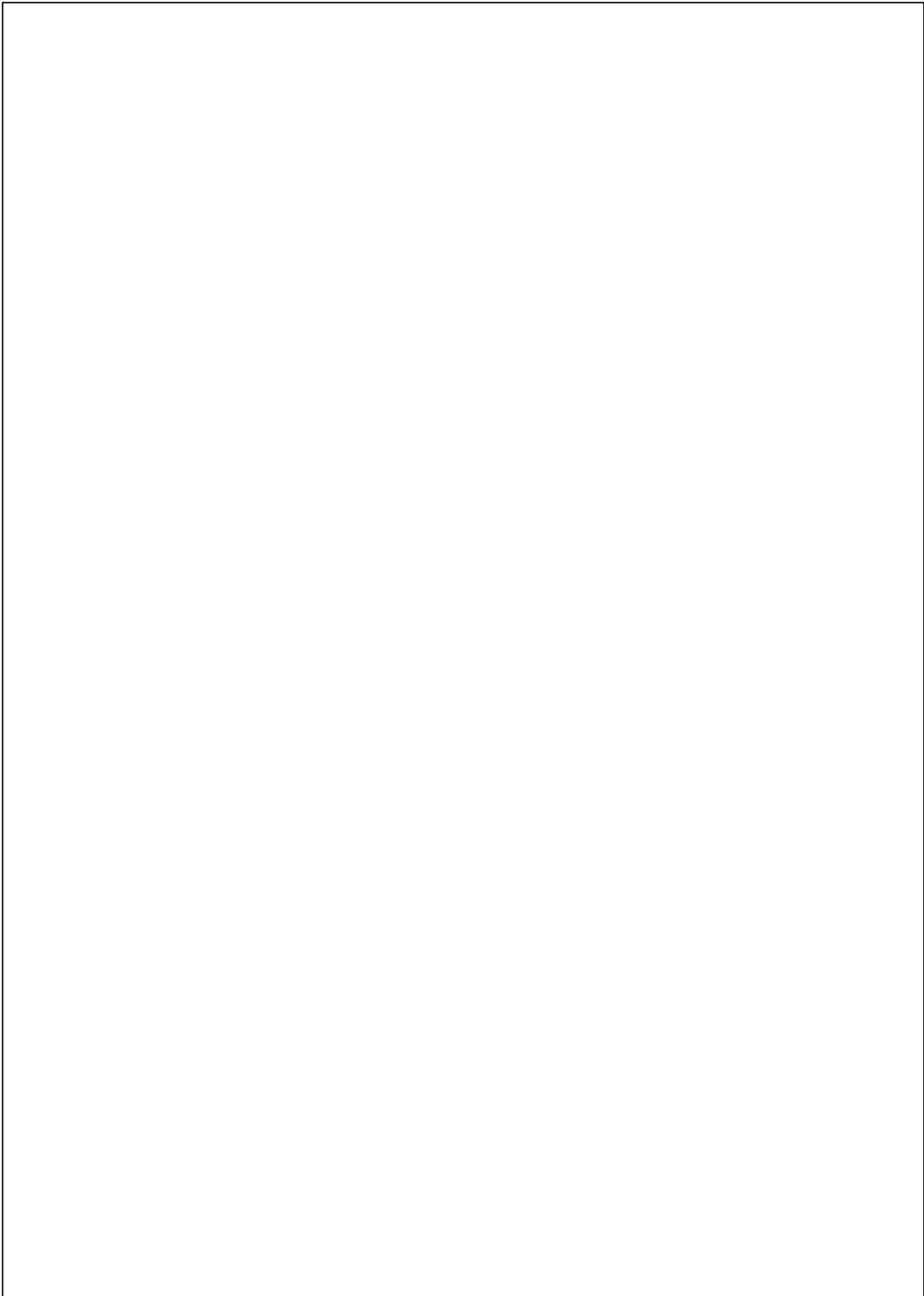
<sup>2</sup> Novita dalam Muslim Resistensi pedagang kaki lima di jalan colombo, yogyakarta:Tesis

Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. (2011). Penolakan Terhadap Informasi sebagai Indikator Resistensi terhadap Perubahan Organisasi. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 20(1), 15

Sugiono. (2018). Metodologi Penelitian kualitatif untk ilmu- ilmu sosial. Jakarta:Salemba Hsumanika.

Handoyono Eko (2012). Eksistensi pedagang Kaki Lima terhadap Resistensi PKL (Studi tentang kontribusi modal sosial terhadap resistensi PKL di semarang). Disertai : Universitas Kristen Satyawana wacana.

Umar, H. 2010. Kebijakan publik. Semarang : widya karya . Peraturan kota semarang no.11 tahun 2000 penataan dan pembina pkl kota semarang. Posititivistik dan Berbasis pemecahan masalah. Jakarta : Rajawali Pers.



# "ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS PADA PASAR BERINGIN KOTA GUNUNGSITOLI)"

## ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

19%

2

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

5%

3

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

3%

4

[journal.unesa.ac.id](http://journal.unesa.ac.id)

Internet Source

2%

5

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

2%

6

[jurnal.datadosen.com](http://jurnal.datadosen.com)

Internet Source

1%

7

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

1%

8

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

1%

[eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

9

Internet Source

1 %

---

10

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

1 %

---

11

[repository.uhn.ac.id](http://repository.uhn.ac.id)

Internet Source

1 %

---

12

[digilib.ikipgriptk.ac.id](http://digilib.ikipgriptk.ac.id)

Internet Source

1 %

---

13

[lumajangkab.go.id](http://lumajangkab.go.id)

Internet Source

1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



# "ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS PADA PASAR BERINGIN KOTA GUNUNGSITOLI)"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

---

PAGE 21

---

PAGE 22

---

PAGE 23

---

PAGE 24

---

PAGE 25

---

PAGE 26

---

PAGE 27

---

PAGE 28

---

PAGE 29

---

PAGE 30

---

PAGE 31

---

PAGE 32

---

PAGE 33

---

PAGE 34

---

PAGE 35

---

PAGE 36

---

PAGE 37

---

PAGE 38

---

PAGE 39

---

PAGE 40

---

PAGE 41

---

PAGE 42

---

PAGE 43

---

PAGE 44

---

PAGE 45

---

PAGE 46

---

PAGE 47

---

PAGE 48

---

PAGE 49

---

PAGE 50

---

PAGE 51

---

PAGE 52

---

PAGE 53

---

PAGE 54

---

PAGE 55

---

PAGE 56

---

PAGE 57

---

PAGE 58

---

PAGE 59

---

PAGE 60

---

PAGE 61

---